



PPID
Kota Magelang

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr. wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Alloh swt yang telah melimpahkan rahmat dan segala kemudahan sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 dapat tersusun.

Pemerintah Kota Magelang selaku Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan Badan Publik terhadap ketentuan perundang-undangan. Tahun 2021, Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana melalui website, media social, seperti twitter, Instagram, facebook selain layanan langsung terkait dengan permohonan informasi publik.

Harapan kami ke depan *stakeholder* pada Pemerintah Kota Magelang, yaitu semua perangkat daerah, RSUD dan BUMD di lingkup Pemerintah Kota Magelang tetap selalu memberikan layanan informasi publik secara optimal sesuai dengan amanat perundang-undangan menuju pada keterbukaan informasi publik dan menjadikan Pemerintah Kota Magelang informatif dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Badan Publik selaku PPID Pelaksana yang telah berperan dalam memberikan layanan informasi publik.

Wassalamualaikum. wr. wb

Kepala Dinas Komunikasi Informatika

dan Statistik Kota Magelang

selaku PPID Utama



DRS. SURYANTORO

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	2
a. Organisasi Pelaksana PPID	2
b. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	3
c. Sumber Daya	3
d. Anggaran Layanan Informasi Publik	4
e. Waktu Layanan Informasi Publik	4
3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	5
a. Jumlah Keberatan yang Diterima	5
b. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	5
c. Sengketa, Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Putusan Pengadilan	5
4. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	5
a. Kendala Eksternal layanan	5
b. Kendala Internal layanan	6
5. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	6
6. Rincian Layanan Informasi Publik	6
a. Jumlah permohonan Informasi Publik	6
b. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	7
c. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	7
d. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	7
7. Lampiran	9

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya menjabarkannya ke dalam bentuk kebijakan, berupa :

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;

2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/098/112 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Magelang.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

A. Organisasi Pelaksana PPID

Pembentukan organisasi pelaksana PPID pada Pemerintah Kota Magelang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...” (pasal 1); setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya (pasal 10).

Selanjutnya dalam penyelenggaraan diatur dengan Keputusan Walikota Magelang, sebagaimana penyelenggaraan di tahun 2021 diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor: 487.22/098/112 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Magelang dengan susunan Tim Pelaksana PPID sebagai berikut:

- Walikota Magelang selaku Pengarah I
- Wakil Walikota Magelang selaku Pengarah II
- Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Komunikasi informatika dan Statistik selaku Ketua

- Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku Wakil Ketua
- Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku Sekretaris
- Selaku Anggota, meliputi seluruh Sekretaris di Perangkat Daerah; Direktur BUMD di lingkup Pemerintah Kota Magelang; Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang; Kepala Bidang, Kasi dan 1 (orang) pelaksana di masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pengelolaan PPID Pelaksana, meliputi:

1) Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melayani permohonan melalui kantor di Jl. Sarwo Edhie Wibowo No 2 Kota Magelang, Jawa Tengah dengan fasilitas ruang pelayanan, petugas pelayanan, formulir pelayanan informasi publik dan kelengkapan kantor lainnya.

2) Formulir online

Pemohon dapat mengajukan informasi melalui formulir online pada website di alamat ppid.magelangkota.go.id/permohonan-informasi/

3) Email ditujukan ke alamat ppid@magelangkota.go.id

4) Surat dialamatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, Jl. Sarwo Edhie Wibowo No 2 Kota Magelang, Jawa Tengah.

C. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik meliputi sumber daya manusia, aset pelayanan termasuk produk hukum, pengetahuan pelayanan serta anggaran. Pengelolaan PPID dan PPID Pelaksana oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang

Nomor 41 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

D. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional PPID melekat pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan KOMunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp 17.914.000,-. Pengalokasian anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan PPID, seperti:

- Rapat Koordinasi PPID pada 6 September 2021 dan tanggal 12 Maret 2021.
- Sosialisasi Kelembagaan PPID dengan narasumber dari Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 10 Nopember 2021 dengan narasumber Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos dan tanggal 31 Maret 2021 dengan narasumber Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH.
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana pada tanggal 6 September 2021.
- Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Tanggal 16 Juni 2021

E. Waktu Layanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan setiap hari kerja senin s/d kamis 08.00 –15.00 WIB dan Jum'at 08.00 –11.00 WIB. Adapun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau saluran informasi lainnya.

III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Jumlah Keberatan	Jumlah Mediasi	Jumlah Sengketa
Individu	2.090	-	-	-
Badan hukum	96	-	-	-
Instansi Pemerintah	3.910	-	-	-
Lembaga Pendidikan	978	-	-	-
Kelompok Orang	15	-	-	-
Lain-lain	221	-	-	-
Jumlah	7.310	-	-	-

B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah permohonan tahun 2021 yang masuk sebanyak 7.310 seperti tabel di atas, tidak ada permohonan yang berlanjut sampai dengan pengajuan keberatan sehingga tidak ada tanggapan atas keberatan yang ada.

C. Sengketa, Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Putusan Pengadilan

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah keberatan atas jumlah permohonan tahun 2021 sebanyak 0 (nol) maka tidak ada permohonan yang berlanjut sampai dengan sengketa informasi, mediasi, ajudikasi maupaun sampai ke pengadilan.

IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal layanan

1. Belum adanya dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan layanan informasi publik di semua PPID Pelaksana.
2. Rotasi pegawai menjadikan perlu adanya pemahaman Kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Pengelolaan informasi publik belum terintegrasi secara sistem.

B. Kendala Internal layanan

1. Keterbatasan pemahaman bagi pengelola terkait sumber hukum pengecualian informasi.
2. Layanan informasi publik belum disetarakan sebagai layanan dasar masyarakat sehingga pemberian layanan belum maksimal.
3. Kurangnya sarana/ fasilitas layanan yang memadai.
4. Belum optimalnya pembagian tugas internal antar bidang pelaksana layanan publik.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan layanan informasi publik, antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan informasi melalui rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Rapak koordinasi dengan seluruh pengelola Informasi Publik yang akan dilaksanakan di Tahun 2021.
2. Pengelolaan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana secara terstruktur.
4. Peningkatan pengelolaan website PPID dan PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan terhadap pengguna informasi

VI. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2021 PPID Kota Magelang mengelola sebanyak 7.310 permohonan Informasi publik dengan rincian sbb:

A. Jumlah permohonan Informasi Publik

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan					
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya
Individu	2.090	1.119	560	1	-	366	44
Badan hukum	96	80	2	2	-	11	1
Instansi Pemerintah	3.910	200	2.010	79	-	1.135	486
Lembaga Pendidikan	978	98	657	-	-	223	-
Kelompok Orang	15	13	-	-	2	-	-
Lain-lain	221	59	118	-	-	2	42
Jumlah	7.310	1.569	3.347	82	2	1.737	573

B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu Pemenuhan	
		Sesuai	Melebihi
Individu	2.090	2.090	-
Badan hukum	96	96	-
Instansi Pemerintah	3.910	3.905	5
Lembaga Pendidikan	978	978	-
Kelompok Orang	15	15	-
Lain-lain	221	221	-
Jumlah	7.310	7.305	5

C. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Kriteria Pemenuhan	
		Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya
Individu	2.090	309	1.781
Badan hukum	96	9	87
Instansi Pemerintah	3.910	85	3.825
Lembaga Pendidikan	978	-	978
Kelompok Orang	15	5	10
Lain-lain	221	-	221
Jumlah	7.310	408	6.902

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

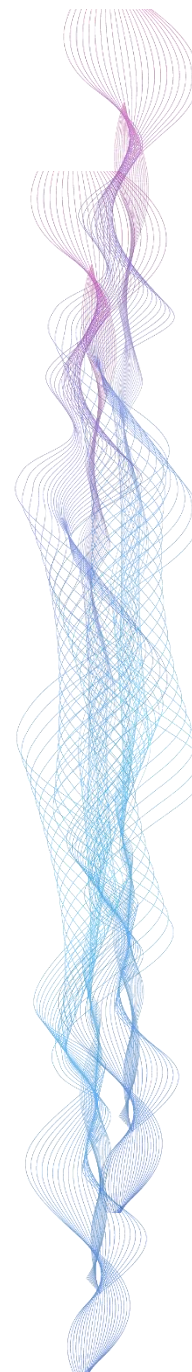
Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Kriteria Pemenuhan		
		Ditolak krn Dikecualikan	Ditolak krn Tidak dikuasai	Ditolak krn Alasan lain
Individu	2.090	-	-	-
Badan hukum	96	-	-	-
Instansi Pemerintah	3.910	-	-	-
Lembaga Pendidikan	978	-	-	-
Kelompok Orang	15	-	-	-
Lain-lain	221	-	-	-
Jumlah	7.310	-	-	-

Dari tabel tersebut di atas, masing-masing rata-rata waktu pemenuhan berkisar 1,17 hari dengan rincian sebagai berikut :

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Rata-Rata Waktu Pemenuhan
Individu	2.090	1.29
Badan hukum	96	1.27
Instansi Pemerintah	3.910	1.18
Lembaga Pendidikan	978	0.89
Kelompok Orang	15	2.40
Lain-lain	221	1.00
Jumlah	7.310	1.17

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang tahun 2021 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

LAMPIRAN



REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan							Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	Rata-Rata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain					
1	Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Dinkes	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	3.75	
5	DPUPR	136	136	-	-	-	-	-	136	-	68	68	-	-	-	-	-	0.68	
6	Disperkim	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00	
7	Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Disnaker	4	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	1.00	
9	DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DPMPTSP	37	-	23	1	-	13	-	32	5	-	37	-	-	-	-	-	0.86	
12	Disporapar	23	-	7	-	-	16	-	23	-	-	23	-	-	-	-	-	3.87	
13	Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Disperindag	1,684	11	130	78	-	1,030	435	1,684	-	-	1,684	-	-	-	-	-	1.00	
16	SatpolPP	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	1.00	
17	Bappeda	88	6	61	-	-	21	-	88	-	-	88	-	-	-	-	-	1.00	
18	Balitbang	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	1.00	
19	BKPP	8	-	-	-	-	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	1.00	
20	Disdukcapil	131	12	76	-	-	43	-	131	-	-	131	-	-	-	-	-	1.00	
21	Bakesbangpol	27	27	-	-	-	-	-	27	-	-	27	-	-	-	-	-	3.00	
22	KMS	54	3	-	-	-	20	31	54	-	-	54	-	-	-	-	-	6.70	
23	KMT	1,066	995	37	-	-	18	16	1,066	-	-	1,066	-	-	-	-	-	1.00	
24	KMU	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	4.00	
25	Disperpa	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1.00	
26	BPKAD	3,016	-	3,012	2	2	-	-	3,016	-	-	3,016	-	-	-	-	-	1.00	
27	RSUD	334	334	-	-	-	-	-	334	-	334	-	-	-	-	-	-	3.68	
28	Setda (Prokopim)	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	5	-	-	-	-	-	1.00	
29	Diskominsta	43	-	-	-	-	-	43	43	-	-	43	-	-	-	-	-	7.65	
30	TKL	544	-	-	-	-	544	-	544	-	-	544	-	-	-	-	-	0.37	
31	PDAM	74	3	-	-	-	23	48	74	-	-	74	-	-	-	-	-	1.00	
32	Bank Mgl	4	3	-	-	-	1	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1.00	
33	BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7,310	1,569	3,347	82	2	1,737	573	7,305	5	408	6,902	-	-	-	-	-	1.17	

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	RataRata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain				
Individu	2,090	1,119	560	1	-	366	44	2,090	-	309	1,781	-	-	-	-	-	-	1.29
1 Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Dinkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 DPUPR	110	110	-	-	-	-	-	110	-	54	56	-	-	-	-	-	-	0.31
6 Disperkim	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.00
7 Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Disnaker	4	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1.00
9 DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 DPMPTSP	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
12 Disporapar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Disperindag	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.00
16 SatpolPP	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1.00
17 Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Balitbang	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.00
19 BKPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Disdukcapil	55	12	-	-	-	43	-	55	-	-	55	-	-	-	-	-	-	1.00
21 Bakesbangpol	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	3.00
22 KMS	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.00
23 KMT	715	715	-	-	-	-	-	715	-	-	715	-	-	-	-	-	-	1.00
24 KMU	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4.00
25 Disperpa	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
26 BPKAD	558	-	558	-	-	-	-	558	-	-	558	-	-	-	-	-	-	1.00
27 RSUD	250	250	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	3.34
28 Setda (Prokopim)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Diskominsta	43	-	-	-	-	-	43	43	-	-	43	-	-	-	-	-	-	7.65
30 TKL	323	-	-	-	-	323	-	323	-	-	323	-	-	-	-	-	-	0.31
31 PDAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Bank Mgl	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.00
33 BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	RataRata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain				
Badan hukum	96	80	2	2	-	11	1	96	-	9	87	-	-	-	-	-	-	1.27
1 Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Dinkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 DPUPR	17	17	-	-	-	-	-	17	-	9	8	-	-	-	-	-	-	1.48
6 Disperkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Disnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 DPMPTSP	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
12 Disporapar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Disperindag	3	2	-	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.00
16 SatpolPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Balitbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 BKPP	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1.00
20 Disdukcapil	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
21 Bakesbangpol	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	3.00
22 KMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 KMT	51	51	-	-	-	-	-	51	-	-	51	-	-	-	-	-	-	1.00
24 KMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Disperpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 BPKAD	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.00
27 RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Setda (Prokopim)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Diskominsta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 TKL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 PDAM	8	1	-	-	-	7	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1.00
32 Bank Mgl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	RataRata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain				
Instansi Pemerintah	3,910	200	2,010	79	-	1,135	486	3,905	5	85	3,825	-	-	-	-	-	-	1.18
1 Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Dinkes	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5.00
5 DPUPR	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3.08
6 Disperkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Disnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 DPMPSTSP	35	-	21	1	-	13	-	30	5	-	35	-	-	-	-	-	-	0.86
12 Disporapar	20	-	4	-	-	16	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	4.00
13 Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Disperindag	1,518	7	13	78	-	1,029	391	1,518	-	-	1,518	-	-	-	-	-	-	1.00
16 SatpolPP	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1.00
17 Bappeda	82	-	61	-	-	21	-	82	-	-	82	-	-	-	-	-	-	1.00
18 Balitbang	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.00
19 BKPP	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1.00
20 Disdukcapil	75	-	75	-	-	-	-	75	-	-	75	-	-	-	-	-	-	1.00
21 Bakesbangpol	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	3.00
22 KMS	51	-	-	-	-	20	31	51	-	-	51	-	-	-	-	-	-	7.00
23 KMT	154	83	37	-	-	18	16	154	-	-	154	-	-	-	-	-	-	1.00
24 KMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Disperpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 BPKAD	1,799	-	1,799	-	-	-	-	1,799	-	-	1,799	-	-	-	-	-	-	1.00
27 RSUD	84	84	-	-	-	-	-	84	-	84	-	-	-	-	-	-	-	4.70
28 Setda (Prokopim)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.00
29 Diskominsta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 TKL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 PDAM	64	2	-	-	-	14	48	64	-	-	64	-	-	-	-	-	-	1.00
32 Bank Mgl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan						Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	RataRata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain					
Lembaga Pendidikan	978	98	657	-	-	223	-	978	-	-	978	-	-	-	-	-	-	0.89	
1 Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Dinkes	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.00	
5 DPUPR	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.00	
6 Disperkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Disnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 Disporapar	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4.00	
13 Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Disperindag	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.00	
16 SatpolPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Bappeda	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.00	
18 Balitbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 BKPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 Disdukcapil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 KMS	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3.00	
23 KMT	85	85	-	-	-	-	-	85	-	-	85	-	-	-	-	-	-	1.00	
24 KMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Disperpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 BPKAD	655	-	655	-	-	-	-	655	-	-	655	-	-	-	-	-	-	1.00	
27 RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Setda (Prokopim)	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1.00	
29 Diskominsta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 TKL	221	-	-	-	-	221	-	221	-	-	221	-	-	-	-	-	-	0.45	
31 PDAM	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00	
32 Bank Mgl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	RataRata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain				
Kelompok Orang	15	13	-	-	2	-	-	15	-	5	10	-	-	-	-	-	-	2.40
1 Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Dinkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 DPUPR	7	7	-	-	-	-	-	7	-	5	2	-	-	-	-	-	-	4.00
6 Disperkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Disnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Disporapar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Disperindag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 SatpolPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Bappeda	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.00
18 Balitbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 BKPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Disdukcapil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 KMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 KMT	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.00
24 KMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Disperpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 BPKAD	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.00
27 RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Setda (Prokopim)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Diskominsta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 TKL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 PDAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Bank Mgl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jml Sengketa	RataRata Waktu Pemenuhan
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dikecualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain				
Lain-lain	221	59	118	-	-	2	42	221	-	-	221	-	-	-	-	-	-	1.00
1 Setwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Disdikbud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Dinkes	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
5 DPUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Disperkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Dinsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Disnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 DP4KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dishub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Disporapar	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
13 Disperpusip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Disperindag	159	-	117	-	-	-	42	159	-	-	159	-	-	-	-	-	-	1.00
16 SatpolPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Balitbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 BKPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Disdukcapil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 KMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 KMT	58	58	-	-	-	-	-	58	-	-	58	-	-	-	-	-	-	1.00
24 KMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Disperpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
27 RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Setda (Prokopim)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Diskominsta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 TKL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 PDAM	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
32 Bank Mgl	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.00
33 BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 PD Perbengkelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 PD Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7,310	1,569	3,347	82	2	1,737	573	7,305	5	408	6,902	-	-	-	-	-	-	1.17



Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tata kelola layanan informasi publik, di Aula Adipura Kencana Rabu (31/03/2021).



Sosialisasi dan Uji Konsekuensi Informasi Publik Kota Magelang Tahun 2021 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Daerah Kota Magelang, Rabu, (16/06/2021)



Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, koordinasi dengan PPID Pelaksana yang mengelola/ menangani Covid-19 dengan dana besar seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), kegiatan dilakukan di laboratorium Diskominsta, Senin (06/09/21)